

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI DESA CIBUNUT KECAMATAN ARGAPURA  
KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT**

*Oleh*

**Eny Dwi Septina**

Bagian Keprajaan IPDN

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN

dwiseptinaeny@gmail.com

---

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine and analyze Community Participation in Development Planning in Cibunut Village, Argapura District, Majalengka Regency, West Java Province. The research method used is descriptive research method, with a qualitative approach. Data obtained through data collection techniques: interviews and documentation. The results of this study indicate that Community Participation in Development Planning in Cibunut Village, Argapura District, Majalengka District, West Java Province is still low. What is meant by different information retrieval: The information needed and the continuity of information in the formation of the Village Consultative Organizing Committee is not a form of commitment, but is a task of the government or better known as the Top Down Planning approach. Consultation on and planning in development planning in Cibunut Village. In addition, they can also use the Village Consultative Committee and other members to do and participate. Retrieval of Community Participation in development in Cibunut Village by enabling individual and community groups in Cibunut Village. Action initiative Community participation in development planning in Cibunut Village includes awareness of thoughts, energy, assets, skills, skills and social as well as the influence of the Cibunut Village community.*

***Keywords:** participation, planning and development*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat masih rendah. Hal tersebut dilihat berdasarkan beberapa aspek antara lain: Andil Informasi mengenai bentuk informasi dan keberlangsungan informasi dalam pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa bukan merupakan usulan atau kehendak dari masyarakat, tapi merupakan perintah dari pemerintah kecamatan atau lebih dikenal dengan pendekatan *Top Down Planning*. Konsultasi mengenai pendapat dan cara berhubungan dalam perencanaan pembangunan di Desa Cibunut adanya dominasi kewenangan yang kuat dari Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sehingga anggota

panitia yang lain bersifat pasif dan apatis serta memilih untuk tidak ikut berpartisipasi. Pengambilan keputusan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut dengan adanya keputusan secara individu maupun kelompok masyarakat Desa Cibunut. Inisiatif tindakan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut adanya kesadaran buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, kemahiran dan sosial serta pengaruh kesadaran dari masyarakat Desa Cibunut.

**Kata kunci:** partisipasi, perencanaan dan pembangunan

## PENDAHULUAN

Desa Cibunut merupakan salah satu desa di Kabupaten Majalengka yang telah cukup lama menerapkan konsep musrenbang di dalam proses penyusunan rencana pembangunan desanya. Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Cibunut.

Meskipun telah tersusunnya dokumen Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Cibunut 2015-2021 bukan berarti Desa Cibunut telah berhasil menerapkan konsep perencanaan pembangunan partisipatif dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya program usulan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah desa Cibunut di dalam rencana pembangunan tersebut seperti yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat desa Cibunut berikut.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa masih sekedar formalitas saja. Jika musrenbang yang merupakan agenda tahunan untuk musyawarah hanya menjadi rutinitas formal yang dilakukan tiap tahun tapi output-nya tidak sesuai. Berbagai program yang ada pada musyawarah masyarakat dalam musrenbang desa dapat tereliminasi di tingkat atasnya (10/7/2017).

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Cibunut, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 yang berbunyi; Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Diawali dengan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. Hal menarik tersebut antara lain mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan melalui musrenbang desa sampai kecamatan kurang melibatkan masyarakat untuk memutuskan kegiatan prioritas, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, dituntut adanya partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan karena merekalah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Sebagian di antara masyarakat di Desa Cibunut yang sudah ikut terlibat dalam pembangunan. Belum dapat dipastikan apakah hal tersebut disebabkan adanya semacam paksaan atau karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan untuk kebaikan bersama. Sehingga ditemukan gejala-gejala seperti tingginya tingkat respons masyarakat pada pembangunan atau selalu membuka diri jika dimintai pertolongan, tingkat kehadiran stakeholders seperti tokoh adat dan agama setempat, tokoh pemuda, anggota organisasi kemasyarakatan yang masih rendah yang semata-mata hanya memenuhi undangan kepala desa saja sehingga kehadirannya lebih banyak menjadi pendengar. Adapula

beberapa tokoh masyarakat yang diundang dalam musyawarah pembangunan desa tidak bisa hadir dan mewakilkannya pada orang lain yang kurang memahami perencanaan pembangunan. Sehingga mereka tidak mengajukan usulan, tidak memberikan masukan dan juga tidak mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Tetapi di lain pihak tetap masih ada kelompok masyarakat yang tidak ingin melibatkan diri pada proses pembangunan, mungkin saja disebabkan berbagai faktor yang menghambat atau terlalu mengedepankan ego pribadinya.

Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang Desa yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Fenomena ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) di Desa Cibunut, kegiatan musrenbangdes dihadiri oleh masyarakat desa Cibunut dan pemerintah desa setempat. Sebelum dilaksanakan musrenbangdes, masyarakat desa Cibunut menyerahkan daftar identifikasi kebutuhan mereka ke Kantor kepala Desa sebelum penyelenggaraan musrenbangdes, pada tahap musrenbangdes, aparat desa membacakan daftar identifikasi kebutuhan dari masyarakat desa, namun tidak mendiskusikan kebutuhan mana yang dijadikan prioritas yang akan diusulkan pada musrenbangdes tahapan selanjutnya. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah desa masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang selanjutnya.

Hal menarik lain adalah proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Riyadi dan Bratakusumah (2004: 36) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan.

Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta dan data yang dijadikan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan yang bersifat fisik dalam pencapaian tujuan yang lebih baik.

Proses perencanaan pembangunan di desa Cibunut dilakukan dengan musyawarah pembangunan desa, di mana dalam perencanaan pembangunan telah dibuka kesempatan bagi seluruh warga dan untuk berpartisipasi. Dalam proses perencanaan pembangunan di desa ini pemerintah desa mengupayakan pengikutsertaan masyarakat sehingga melalui partisipasi tersebut, masyarakat merencanakan sendiri kebutuhan dan keinginannya berdasarkan kondisi objektif dan potensi rill yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan desain penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat secara mendalam (tidak meluas). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rusidi (2006: 24) bahwa, "Desain penelitian kualitatif dilakukan pada empirik secara mendalam, tetapi tidak meluas untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkret, spesifik dan locus".

Penelitian kualitatif menggunakan kata-kata yang menyampaikan munculnya rancangan karena adanya proses penelitian model induktif dalam rangka rancangan kualitatif. Kata-kata seperti penggambaran, memahami, mengembangkan, dan

menemukan yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (Evony,2007: 66) bahwa dalam penelitian kualitatif seorang peneliti tidak memulai dengan suatu teori tertentu untuk menguji atau memverifikasi, sebagai gantinya konsisten dengan model pemikiran induktif, suatu teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisis penelitian yang digunakan pada akhir penelitian sebagai dasar untuk perbandingan dengan teori lain. Kemudian Evony dalam Creswell (2007: 7) mengemukakan enam asumsi penelitian kualitatif yaitu:

1. Peneliti kualitatif memiliki pandangan utama terhadap proses-proses, dibanding hasil atau produk.
2. Peneliti kualitatif tertarik akan makna bagaimana orang-orang memberikan arti pada hidup mereka, pengalaman dan struktur dunia mereka.
3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen utama untuk pengumpulan dan analisis data. Data dimediasi melalui instrumen manusia, disanding melalui kuesioner atau mesin.
4. Penelitian kualitatif melibatkan lapangan kerja. Para peneliti secara fisik mengambil orang-orang, latar belakang, atau institusi untuk mengamati atau mencatat sikap dalam latar belakang alaminya.
5. Peneliti kualitatif adalah penelitian yang deskriptif di mana para peneliti tertarik dalam proses, makna, dan pemahaman yang digabungkan melalui dunia atau gambaran.
6. Proses penelitian kualitatif adalah proses yang induktif di mana para peneliti membangun konsep, hipotesis dan teori dari berbagai rincian.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian ini akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual

dan akurat terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Menurut Nawawi (1983: 12) metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (manusia, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek dari penelitian itu (Bungin, 2001: 23). Dalam penelitian deskriptif ini, berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Merujuk pada teori yang disampaikan Nawawi di atas, maka penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sangat sesuai untuk memahami dan menggambarkan fenomena social yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti berkeyakinan bahwa dengan penelitian kualitatif akan memperoleh informasi yang selanjutnya dengan informasi tersebut peneliti bisa membuat interpretasi dan analisis untuk mendeskripsikan partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Dengan wawancara maka peneliti dapat mengetahui dan mendengarkan pendapat dan ide-ide dari informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara

semiterstruktur yang dilakukan secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan, Kepala Desa Cibunut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cibunut, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Desa Cibunut Kepala Dusun (Cukangsari, Desa, Cibunut Wetan, Cibunut Kulon) dan Tokoh Masyarakat (tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh pendidikan) Desa Cibunut.

2. Observasi/pengamatan

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapat gambaran secara menyeluruh tentang partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk lebih memperoleh data yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik itu data-data sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lainnya; termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibunut Tahun 2015-2022.

4. Triangulasi

Penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data

untuk mengetahui data yang lebih luas dan lebih pasti sehingga membantu peneliti untuk lebih memahami fokus penelitian (Patton dalam Sutopo, 2006: 98). Peneliti dapat menggunakan sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda atau teknik yang sama dengan sumber yang berbeda.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

### LANDASAN TEORETIS

Dalam konteks penelitian ini konsep yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat adalah konsep partisipasi masyarakat menurut Sutrisno (2000: 21), mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat yaitu:

a) Andil informasi

Apakah masyarakat dan organisasi (setidaknya) mengerti apa yang terjadi dan mengapa terjadi, Informasi yang diberikan, dalam bentuk apa saja, seberapa sering, apakah tingkat penguasaan huruf dan membaca serta tingkat pendidikan dari peserta perlu dijadikan pertimbangan.

b) Konsultasi

Apakah ada dialog, antar- siapa, pandangan-pandangan dan pendapat siapa yang dikemukakan dan bagaimana cara mereka berhubungan, apakah dialog tersebut memiliki pengaruh dalam keputusan manajemen.

c) Pengambilan Keputusan

Partisipasi mencapai jenjang yang lebih tinggi apabila keterlibatan individu atau kelompok (terutama mereka yang tersingkir) dalam pengambilan keputusan. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan proyek, dan siapa yang tidak berwenang, bagaimana

kewenangan tersebut terstruktur, Apakah ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan membuat pertanggungjawaban berkaitan dengan kendali dari alokasi sumber, Siapa yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan.

d) Inisiatif tindakan

Jenjang tertinggi dari partisipasi apabila masyarakat, terutama masyarakat yang tidak beruntung, menempatkan diri mereka untuk berinisiatif bertindak. Hal ini menandakan tingkat yang meyakinkan dari kepercayaan diri dan kekuasaannya dan mantapnya kapasitas organisasi dan manajemen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ANDIL INFORMASI

Andil informasi menurut Sutrisno (2000: 21), apakah masyarakat dan organisasi (setidaknya) mengerti apa yang terjadi dan mengapa terjadi, Informasi yang diberikan, dalam bentuk apa saja, seberapa sering, apakah tingkat penguasaan huruf dan membaca serta tingkat pendidikan dari peserta perlu dijadikan pertimbangan. Oleh sebab itu peneliti menguraikan andil informasi itu dalam dua indikator berikut.

- Bentuk Tindakan

Sumber informasi dan fasilitas komunikasi yang memadai pada suatu daerah akan menunjang masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pembangunan yang dilaksanakan di Desanya. Penguasaan informasi memungkinkan masyarakat bersikap kritis, mampu berinisiatif, berkreasi, dan dinamis serta mampu mengikuti proses perubahan yang terjadi. Bentuk tindakan informasi mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura

Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat mengenai pembentukan panitia Pelaksana Musyawarah Desa dilakukan secara terpusat dari pihak Kecamatan kepada pihak pemerintah Desa Cibunut.

- Kontinu

Kontinu/kesinambungan informasi perencanaan pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat mengenai pembentukan panitia Pelaksana Musyawarah Desa terus dilakukan pemerintah Desa Cibunut agar informasi perencanaan pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sampai ke masyarakat Desa Cibunut. Kontinu/kesinambungan informasi mengenai partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat mengenai pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa dilakukan secara bertahap dimulai dari pihak pemerintah Desa ke kepala Dusun kemudian ke masyarakat.

### KONSULTASI

Konsultasi menurut Sutrisno (2000: 21), apakah ada dialog, antar- siapa, pandangan-pandangan dan pendapat siapa yang dikemukakan dan bagaimana cara mereka berhubungan, apakah dialog tersebut memiliki pengaruh dalam keputusan manajemen. Oleh sebab itu peneliti menguraikan konsultasi itu dalam dua indikator berikut.

- Pendapat

Pendapat mengenai partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dikemukakan oleh baik itu pihak pemerintah desa Cibunut maupun

masyarakat Desa Cibunut. pendapat mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat didapat dari pihak pemerintah desa Cibunut dan masyarakat Desa Cibunut namun masih ada pendapat mengenai penyusunan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa bahwa panitia yang dibentuk hanya merupakan formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif dari perencanaan pembangunan sehingga anggota panitia yang lain bersifat pasif dan apatis serta memilih untuk tidak ikut berpartisipasi, seharusnya pemerintah Desa Cibunut membentuk panitianya secara demokratis atas dasar usulan dari masyarakat desa Cibunut.

- Cara Berhubungan

Cara berhubungan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada dasarnya dilakukan interaksi antara pemerintah desa Cibunut dan masyarakat Desa Cibunut. cara berhubungan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat berhubungan langsung antara pihak Pemerintah Desa Cibunut dengan Kepala Dusun dan Masyarakat Desa Cibunut.

## **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pengambilan keputusan menurut Sutrisno (2000: 21), partisipasi mencapai jenjang yang lebih tinggi apabila keterlibatan individu atau kelompok (terutama mereka yang tersingkir) dalam pengambilan keputusan. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan proyek, dan siapa yang

tidak berwenang, bagaimana kewenangan tersebut terstruktur, Apakah ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan membuat pertanggungjawaban berkaitan dengan kendali dari alokasi sumber, Siapa yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan. Oleh sebab itu peneliti menguraikan pengambilan keputusan itu dalam dua indikator berikut.

- Individu

Keterlibatan pengambilan keputusan secara individu Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat memang harus terlibat sebagai bentuk partisipasi pada pembangunan di tempat tinggalnya. Pengambilan keputusan secara individu mengenai partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara individu masyarakat Desa Cibunut dengan partisipasi buah pikiran dan Partisipasi membentuk kesepakatan.

- Kelompok

Keterlibatan kelompok masyarakat Desa Cibunut dalam perencanaan pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat memang harus terlibat sebagai bentuk partisipasi kelompok pada pembangunan di tempat tinggalnya. Pengambilan keputusan secara kelompok mengenai partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara kelompok dalam perencanaan, Pembiayaan serta Pemeliharaan dan Pengambilan Hasil Pembangunan di Desa Cibunut.

d. **Inisiatif Tindakan**

Inisiatif tindakan menurut Sutrisno (2000: 21), Jenjang tertinggi dari partisipasi apabila masyarakat, terutama masyarakat yang tidak beruntung, menempatkan diri mereka untuk berinisiatif bertindak. Hal ini menandakan tingkat yang meyakinkan dari kepercayaan diri dan kekuasaannya dan mantapnya kapasitas organisasi dan manajemen. Oleh sebab itu peneliti menguraikan inisiatif tindakan itu dalam dua indikator berikut.

• **Kesadaran**

Setiap masyarakat dalam kehidupan haruslah mempunyai kesadaran baik dalam pergaulan lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Inisiatif tindakan kesadaran partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dilaksanakan atas dasar buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran serta sosial.

• **Pengaruh**

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya suatu merupakan luaran dan partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera. Inisiatif tindakan pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di

Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh kesadaran dari masyarakat Desa Cibunut.

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIBUNUT KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT**

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap isu-isu strategis di atas maka rumusan strategis yang merupakan prioritas utama untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

1. Mengajak para pakar bersama dengan Tokoh Masyarakat yang telah memiliki kesadaran dan wawasan yang cukup untuk mendiskusikan dan menelaah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka perencanaan pembangunan, dengan skor 33 (2,54).
2. Mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan melakukan proses pembagian wewenang yang jelas baik untuk internal Panitia Pelaksana Musyawarah Desa maupun kewenangan Badan Musyawarah Desa dengan pelibatan masyarakat dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan perencanaan pembangunan, dengan skor 32 (2,46).
3. Mengoptimalkan tugas Panitia Pelaksana Musyawarah Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan musyawarah di tingkat Dusun untuk menghimpun aspirasi masyarakat di tingkat bawah, baik untuk menentukan wakilnya yang akan mengikuti Pelaksanaan Musyawarah Desa maupun dalam hal penentuan sikap untuk mendukung Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura

Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan skor 28 (2,15)

4. Lebih menjalin komunikasi yang lebih baik antara Panitia Pelaksana Musyawarah Desa, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Cibunut dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat, dengan skor 27 (2,07).

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat masih rendah disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:
  - a. Andil Informasi mengenai bentuk informasi dan keberlangsungan informasi dalam Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa bukan merupakan usulan atau kehendak dari masyarakat, tapi merupakan perintah dari pemerintah kecamatan atau lebih dikenal dengan pendekatan *Top Down Planning*.
  - b. Konsultasi mengenai pendapat dan cara berhubungan dalam perencanaan pembangunan di Desa Cibunut adanya dominasi kewenangan yang kuat dari Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sehingga anggota panitia yang lain bersifat pasif dan apatis serta memilih untuk tidak ikut berpartisipasi. Hal ini dipicu oleh adanya pemahaman yang keliru dari Ketua dan beberapa anggota Panitia Pelaksana Musyawarah Desa bahwa panitia yang dibentuk hanya merupakan formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif dari rencana perencanaan pembangunan.
  - c. Pengambilan keputusan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut dengan adanya keputusan secara individu maupun kelompok masyarakat Desa Cibunut.
  - d. Inisiatif tindakan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut adanya kesadaran buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, kemahiran dan sosial serta pengaruh kesadaran dari masyarakat Desa Cibunut.
2. Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan dan dilanjutkan dengan Test Litmus, beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.
  - a. Mengajak para pakar bersama dengan Tokoh Masyarakat yang telah memiliki kesadaran dan wawasan yang cukup untuk mendiskusikan dan menelaah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka perencanaan pembangunan, dengan skor 33 (2,54).
  - b. Mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan melakukan proses pembagian wewenang yang jelas baik untuk internal Panitia Pelaksana Musyawarah Desa maupun kewenangan Badan Musyawarah Desa dengan pelibatan masyarakat dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan perencanaan pembangunan, dengan skor 32 (2,46).
  - c. Mengoptimalkan tugas Panitia Pelaksana Musyawarah Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi

Jawa Barat dengan melaksanakan musyawarah di tingkat Dusun untuk menghimpun aspirasi masyarakat di tingkat bawah, baik untuk menentukan wakilnya yang akan mengikuti Pelaksanaan Musyawarah Desa maupun dalam hal penentuan sikap untuk mendukung Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan skor 28 (2,15)

- d. Lebih menjalin komunikasi yang lebih baik antara Panitia Pelaksana Musyawarah Desa, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Cibunut dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat, dengan skor 27 (2,07).

## SARAN

### 1. Teoretis

Perlu dikaji secara mendalam mengenai partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

### 2. Praktis

- 1) Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di Desa Cibunut pada era demokrasi seperti saat ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan lebih meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
- 2) Proses sosialisasi dan komunikasi yang intensif tanpa adanya pemaksaan keinginan sepihak hendaknya menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam suatu proses pembangunan.
- 3) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan langkah-langkah strategis sehingga pemerintah desa Cibunut harus menetapkan perencanaan yang matang sebelum memutuskan

untuk melakukan suatu program pembangunan, karena yang akan mendapatkan manfaat maupun yang akan merasakan dampak dari sebuah program pembangunan pada masyarakat itu sendiri.

- 4) Mekanisme perencanaan pembangunan di Desa Cibunut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2002, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Sosial*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press. Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Burns, Danny et. all. 1994. *The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy*. The Macmillan Press. London.
- Carnea, Michael.M. 1988. *Mengutamakan Manusia Di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi Di dalam Pembangunan Pedesaan*. Publikasi Bank Dunia, Penerbit UI. Jakarta
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gaventa John and Camilo Valderrama. 2001. *Mewujudkan Partisipasi: 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*. The British Council. Jakarta.
- Huntington. P. Samuel dan Joan. M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Irawan, Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, DIA FISIP UI, Jakarta.

- , 2007, *Metode Eksperimen Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, UMJ Press, Jakarta.
- Korten, David. C. 2002. *Menuju Abad Ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Korten, David. C. & Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Lawang, Robert, M.Z, 1999, *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat*, UI-press, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Moleong, J.Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Murray Ross, 1985. *Community Organization*. New York. Harper and Brother.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. PT. Ghalia. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Ilmu Pemerintahan I*. BKU Ilmu Pemerintahan. Jakarta.
- . 2000. *Ilmu Pemerintahan II*. BKU Ilmu Pemerintahan. Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1985. *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Oakley, Peter, et al. 1991. *Projects With People, The Practice Of Participation in Rural Development*. International Labour Office. Geneva.
- Osborne dan Gaebler, 2000, *Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, LM PPM dan Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orba*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- . 2000. *Otonomi dan Federalisme (Dampaknya Terhadap Perekonomian)*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sastropetro, Santoso R.A. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni. Bandung.
- Schneider, Hartmut And Marie Helene Libercier. 1995. *Participatory Development From Advocacy to Action*. OECD. Paris.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Administrasi Publik*, Indra Prahasta, Bandung.
- 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius. Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Penerbit PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Yad Mulyadi & Simanjuntak, Posman. 1993. *Sosiologi dan Antropologi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibunut Tahun 2015-2022.